PENGARUH PEMERIKSAN PAJAK DAN PENYELUNDUPAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Survey Pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung)

INFLUENCE OF TAX AUDIT AND TAX EVASION OF TAX COMPLIANCE

(Survey at 4 KPP Pratama in Bandung)

Disusun oleh
FEBY RISYANDI
(Feby.risyandi@rocketmail.com)
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Taxpayer compliance is defined as an act of obedient and aware of the payment and reporting obligations and the annual period of the taxpayer in accordance with tax regulations, as the emergence of adherent and conscious action by the taxpayer the necessary tools to improve taxpayer compliance such as tax audits and tax evasion. The purpose of this study to know the description of the tax, audit and tax compliance of taxpayers, and to know the influence either partially or simultaneously on four KPP Bandung.

The method used is descriptive method of research and verifikatif. The research was conducted in four KPP Bandung area of 60 samples. Statistical test used is the calculation of Pearson correlation, multiple regression analysis, coefficient of determination, hypothesis testing, and also uses PASW 18 for windows applications.

The results of this study were obtained correlation coefficient of 0.528. It indicates the strong scent of the relationship of the tax and compliance of such taxes against the taxpayer. Hypothesis indicates that the tax audit and compliance of such taxes affect taxpayers. Other research also provides empirical evidence that the inspection taxes and the evasion of tax compliance have a significant effect on the taxpayer's tax office in the region Pratama Bandung.

Keywords: Tax Audit, Tax Evasion, Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan system pemungutan pajak secara *Self Assessment*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan begitu pelaksanaan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik. Beberapa kasus mengungkapkan kejadian penyelundupan pajak/*tax evasion,* yaitu Direktorat Jenderal Pajak menemukan dugaan kekurangan pembayaran pajak pada 2007 oleh ketiga perusahaan batu bara Grup Bakrie, yaitu PT Bumi Resources Tbk., PT Kaltim Prima Coal(KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Pemeriksaan bukti permulaan (setara dengan penyelidikan di kepolisian dan KPK) atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahun itu menunjukkan ada indikasi kesalahan data, sehingga mengakibatkan kekurangan sekitar Rp 2,1 triliun (Tempo, 12 Desember

2009).Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di bebarapa wilayah lain di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar,

Menurut Nur Hidayat (2002) pemeriksaan pajak sampai saat ini masih dipandang sebagai sosok yang menakutkan. Selain itu, menurut Ainun (2010) pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen-dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak akan berjalan efektif jika pemeriksa pajak bekerja secara professional, hasil audit BPK menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan terhadap 6 perusahaan yang diperiksa oleh aparat pajak belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku sehingga dikatakan pemeriksaan tidak sepenuhnya berjalan efektif (Melchias Markus Mekeu, 2011). Menkeu menambahkan, telah ditemukan banyak aparat pemeriksa pajak tidak professional, penyebabnya kurangnya kemampuan dan integritas akibatnya mutu pemeriksaan rendah yang ditandai dengan ditemukannya kasus faktur pajak fiktif pada 6 perusahaan yang diperiksa, dengan begitu dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan dapat terjadi pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun sebaliknya menurut pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen – dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan, dan juga wajib pajak yang susah ditemukan karena tempat tinggal wajib pajak yang sudah pindah tetapi wajib pajak tidak melapor kepada petugas pajak, dan apabila wajib pajak yang sudah di periksa wajib pajak terdapat tunggakan pajak dan wajib pajak juga susah untuk membayarnya dan pengisiaan dan penyampaian SPT yang kurang baik (Deni:2012).

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani:2004)

Hal utama yang melata belakangi adanya tindakan penyelundupan pajak seperti beberapa kejadian di atas adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat wajib pajak berusaha menyelundupkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Siti Kurnia Rahayu,2010:140-142).

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Pemeriksaan Pajak

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut:

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Penuelundupan Pajak

menurut Ernest R. Mortenson (2006:118) adalah sebagai berikut :

"Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak."

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) memberikan pendapatnya mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut :

"Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara."

Skema Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Ke patuhan Wajib Pajak

Menurut Oktivani (2007), pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrument penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji da meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pengaruh penyelundupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138), "Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya." Seandainya kepatuhan masyarakat sudah baik, maka penerimaan pajak akan optimal. Sebaliknya jika kepatuhan masih rendah, dapat menimbulkan penyelundupan pajak (*tax evasion)*. Penyelundupan pajak berarti manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (M. Zain, 2008:44).

3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Menurut Husein Umar (2005:303) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambah hal-hal lain jika dianggap perlu ".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Objek Penelitian yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak sebagai variabel bebas dan dapat mempengaruhi (varabel independent).
2. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat dan hanya dapat dipengaruhi (variabel dependen).

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu (Umi Narimawati, 2010:29). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dan metode Verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Desain Penelitian

Menurut Moh. Nazir (2005:84) desain penelitian adalah :

"Desain Penelitian adalah rancangan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian."

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.2
Oprasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan maretial peraturan perundang-undangan (Arens & Loebbeckke, 1995).	1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data 2. Menyusun program pemeriksaan 3. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam 4. Menyediakan sarana pemeriksaan 5. Melakukan penilaian atas system pengendalian intern 6. Melakukan konfirmasi kepaada pihak ketiga 7. Melakukan siding penutup 8. Laporan pelaksanaan pemeriksaan 9. Laporan hasil pemeriksaan 10. Kesimpulan dan usul pemeriksaan	Ordinal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyelundupan Pajak (X2)	Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak Ernest R. Mortenson (2006:118)	1. Tidak menyampaikan SPT 2. Menyampaikan spt tidak benar 3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalah gunakan NPWP / pengukuhan pkp 4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau d potong 5. Berusaha menyuap fiskus	Ordinal	11 12 13 14 15
Kepatuhan wajib Pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannyaSafri	1. Menyampaikan SPT tahunan PPh tepat waktu 2. Menyampaikan SPT tahunan PPh terlambat/lewat waktu (permohonan perpanjangan penyampaian SPT)	Ordinal	16 17

	Nurmantu dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2005:110)	3. Menyampaikan SPT tahunan PPH pembetulan 4. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 5. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan 6. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang 7. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan		18 19 20 21 22

Teknik Penentuan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai populais yang kan diteliti sehingga dapat diperoleh keputusan apakah penelitian ini memerlukan sampel atau tidak dan bagaimana cara pengambilan sampel tersebut.

1. Populasi

   Definisi populasi menurut Sugiyono (2011:80) menyatakan bahwa :

   "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

   Populasi untuk penelitian ini adalah 70 orang pegawai bagian fungsional untuk 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

2. Sampel

   Menurut Sugiyono (2011:81) menyatakan bahwa pengertian sampel adalah sebagai berikut:

   "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi."

   Penarikaan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan *stafied random sampling* berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana pada pegawai yang bertanggung jawab pada bidangnya. *Statified Random sampling* adalah metode penarikan sampel dengan terlebih dahulu mengelompokkan populasi kedalam strata-strata berdasarkan kriteria tertentu kemudian memilih secara acak sederhana setiap sratum, menurut Vincent Gaspers yang ditulis dalam buku Umi Narimawati (2010;38).

Metode penarikan sampel yang digunakan mengacu pada pendekatan *slovin,* pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber : Umi Narimawati (2010:38)

dalam hal ini:
n=jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas kesalahan yang masih dalam batas toleransi, dalam penelitian ini menggunakan 5%.

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melaui perhitungan berikut:

$$r - \frac{70}{1+70\times0.05^2} - 59.57 - 60$$

Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumalah 60 pegawai, yaitu di KPP Karees 15 orang, KPP Tegalega 15 orang, KPP Cibeunying 15, KPP Bojonegara 15 orang pegawai Sehingga berjumlah 60 orang pegawai Sedangkan untuk menilai Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak, data diperoleh dengan mengkombinasikan tanggapan pegawai Pajak mengenai yang telah disebutkan diatas.

Rancangan Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:410) Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif menurut Sugiyono (2011:14) :

"Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail".

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dari variabel X_1 dan X_2, peneliti menggunakan metode kualitatif.

b. Analisis Kuantitatif

- Menurut Sugiyono (2011:31) analisis kuantitatif adalah sebagai berikut :

  "Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris.Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random.Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan.Penyajian data dapat berupa tabel, tabel ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram.Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan."

- Analisis Regresi Linier Berganda

  Menurut Jonathan Sarwono (2006:79) Analisis Regresi Linier Berganda yaitu :

  "Regresi linier berganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung".

  Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh *return on equity* (ROE) dan *dividend per share* (DPS) terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Analisis Korelasi

  Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) (Moh Nazir, 2005:464).
- Koefisien Determinasi

  Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

a) Hipotesis parsial antara variabel bebas Pemeriksaan Pajak terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.
   - Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
   - Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan Penyelundupan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b) Hipotesis parsial antara variabel bebas Penyelundupan Pajak terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.
   - Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pemeriksan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
   - Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c) Hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.
   - Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
   - H_a: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini hanya tiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena data yang dikumpulkan tidak mengandung unsur deret waktu maka tidak dilakukan uji autokorelasi.

1. Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi

Tabel 4.31
Hasil Uji Normalitas Taksiran Model Regresi X –Y

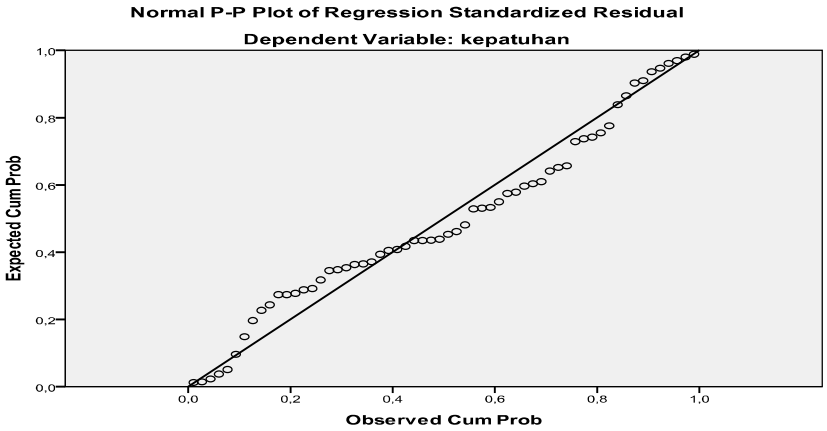
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		pemeriksaan	*penyelundupan*	*kepatuhan*
N		*60*	*60*	*60*
Normal Parameters[a,b]	*Mean*	*28,18*	*22,20*	*26,90*
	Std. Deviation	*8,470*	*4,632*	*4,675*
Most Extreme Differences	*Absolute*	*,118*	*,089*	*,069*
	Positive	*,118*	*,089*	*,069*
	Negative	*-,099*	*-,081*	*-,062*
Kolmogorov-Smirnov Z		*,917*	*,693*	*,537*
Asymp. Sig. (2-tailed)		*,370*	*,724*	*,935*

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber :Data Primer yang telah diolah, 2012

Pada tabel 4.31 dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,370 untuk pemeriksaan pajak, 0,724 untuk penyelundupan pajak, 0,935 untuk kepatuhan wajib pajak. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05),



Gambar 4.1
Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

2. Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.32
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	pemeriksaan	,991	1,009
	penyelundupan	,991	1,009

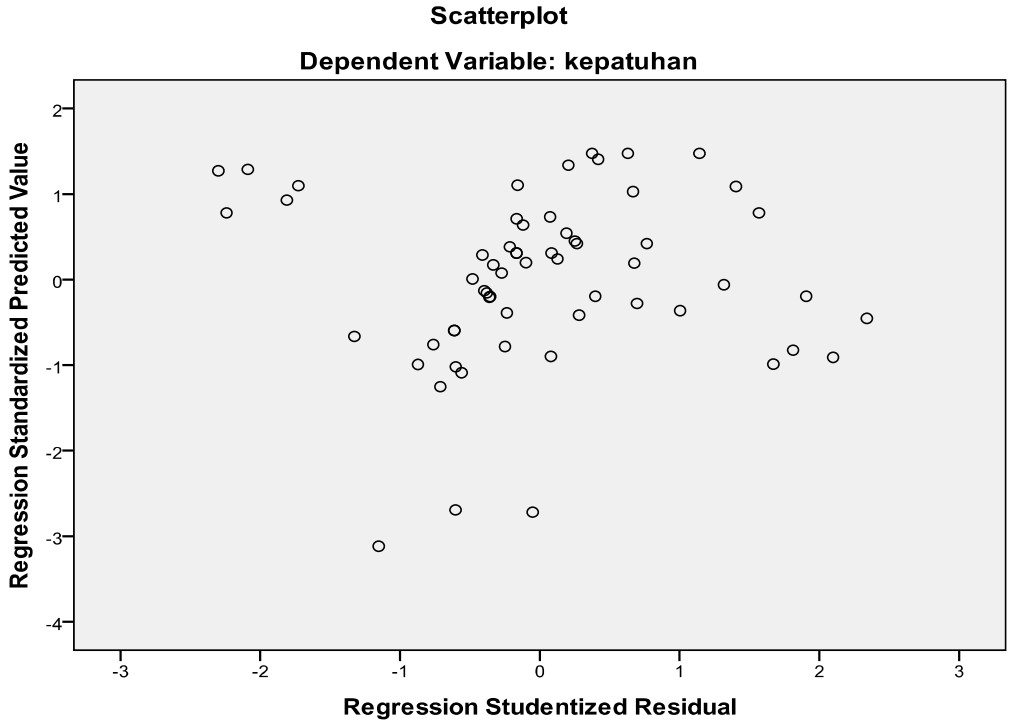
a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2012

Melalui nilai VIF yang diperoleh seperti pada Tabel 4.32 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3 Uji Asumsi Heterokedastisitas

Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi bahwa varians dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini disimpulkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dan residual. Gejala varians residual yang sama dari satu pengamatan yang lain disebut dengan homokedastisitas.



Gambar 4.2
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian asumsi heterokedastisitas terlihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur. Hal tersebut dapat dilihat pada plot yang terpancar dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melakukan prediksi, perubahan nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen naik atau turun nilainya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu dua variabel independen yaitu pemeriksaan pajak sebagai variabel X1 dan penyelundupan pajak sebagai variabel X2 dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai variabel y.
Sehingga dapat diketahui dan dibuktikan sejauh mana hubungan pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak terhadap kepatuhan wajib. Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *PASW 18 for windows* dan diperoleh hasil output sebagai berikut

Tabel 4.33
Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.125	2.991		4.388	.000
	pemeriksaan	.170	.062	.307	2.720	.009
	penyelundupan	.405	.114	.401	3.552	.001

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2012

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

Y = 13,125+ 0,170X1 + 0,405 X2

Dimana :
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X1 = pemeriksaan pajak
X2 = Penyelundupan Pajak

Berdasarkan persamaan prediksi diatas, maka dapat diinterpretasikan koefisien regressi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- Koefisien pemeriksaan pajak sebesar 0,170 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pemeriksaan pajak sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,170 satuan dengan asumsi penyelundupan pajak tidak berubah.
- Koefisien penyelundupan pajak sebesar 0,405 menunjukkan bahwa setiap peningkatan penyelundupan pajak sebesar satuan diprediksi akan meningkatkani kepatuhan wajib pajak sebesar 0,405 satuan dengan asumsi pemeriksaan pajak tidak berubah..
- Nilai konstanta sebesar 13,125 menunjukan nilai prediksi rata-rata kepatuhan wajib pajak apabila pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak sama dengan nol.

KOEFISIEN DTERMINASI

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh Pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh koefisien determinasi Sedangkan hasil perhitungan dengan menggunakan *PASW* 18 *for windows* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.37
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.528[a]	.278	.253	4.040

a. Predictors: (Constant), pemeriksaan, penyelundupan
b. Dependent Variable: kepatuhan
Sumber : Lampiran Output SPSS

Kd = r2 x 100 %
Kd = $(0,528)^2$ x 100 %
Kd = 0,278001 x 100%
Kd = 27.8001
Kd = 27,8 % (Pembulatan)

Nilai R (0,528) pada tabel 4.37 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel bebas (pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak) secara simultan dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak) memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung.

Sementara nilai R-Square sebesar 0,278 atau 27,8 persen, menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak sebesar 27,8 persen. Artinya secara bersama-sama variabel bebas (pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 27,8 % terhadap perubahan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 72,2%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel bebas yang diteliti. Faktor lain diantaranya yaitu kinrja AR, administrasi, kualitas pelayanan, system self assesment yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung, maka penulis dalam bab ini akan memcoba menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, fenomena yang diperoleh yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen – dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan, dan juga wajib pajak yang susah ditemukan karena tempat tinggal wajib pajak yang sudah pindah tetapi wajib pajak tidak melapor kepada petugas pajak, dan apabila wajib pajak yang sudah di periksa wajib pajak terdapat tunggakan pajak dan wajib pajak juga susah untuk membayarnya dan pengisiaan dan penyampaian SPT yang kurang baik. Sehingga diperlukan melakukan peminjaman buku dan dokumen secara intensif.
2. Penyelundupan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. fenomena yang diperoleh yaitu Penggelapan pajak dilakukan menggunakan tiga modus yaitu modus pertama, tersangka mengganti nama dan alamat wajib pajak sehingga pemeriksaan sulit ditelusuri, modus kedua, uang setoran pajak tetap dibayarkan, tetapi dengan jumlah di bawah angka yang harus disetorkan, dan modus ketiga. Sehingga diperlukan pemeriksaan lebih ekstensif untuk mengurangi penyelundupan pajak. penyelundupan pajak di KPP wilayah bandung sudah berjalan baik.
3. Pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, fenomena yang terjadi yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen – dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan. pemeriksaan pajak KPP wilayah bandung naik dan penyelundupan naik dalam pelaksanaannya akan menurunkan kepatuhan wajib pajak pada KPP wilayah Bandung. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya

SARAN

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung terutama bagi KPP yang masih memiliki statistik lebih rendah yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak pada keempat Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung harus meningkatkan dalam melaksanakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, hal ini perlu dilakukan agar pemeriksaan berjalan lancar, fokus dan terarah sehingga tujuan utama pemeriksaan tercapai.

2. Melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama yang ada di Kota Bandung masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka diharapkan dengan dilakukan pemeriksaan pajak akan lebih memonitor kepatuhan wajib pajak karena tidak semua wajib pajak memiliki kepatuhan atau kesadaran yang diharapkan oleh DJP. Oleh karena itu pengawasan dari pemeriksa pajak sangat diperlukan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di KPP wilayah kota Bandung.
3. Karena pemeriksaan pajak memiliki peranan yang tinggi dalam kepatuhan Wajib Pajak maka diharapkan bagi keempt Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung selalu mempertahankan kualitas pemeriksaan pelayanan, karena pemeriksaan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Hal ini perlu dilakukan guna menekankan tingkat ketidakpatuhan dari Wajib Pajak badan yang sangat tinggi, sehingga diharapkan untuk kemudian hari dengan kualitas pelayanan yang baik dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ely Suhayati, dan Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitunga*n. Yogyakarta : Graha Ilmu Mardiasmo (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi

Gunadi. 2005. Fungsi pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak *(Tax Compliance).* Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4 Nomor 5 Februari 2005. ISSN 1412-0518

Husein Umar 2005. Metodologi Penlitian. Raja Grafindo.Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 199/PMK.03/2007. Tanggal: 28-12-2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Khadijah Isa and Jeff Pope. Corporate Tax Audits: Evidence from Malaysia

Luigi Alberto Franzoni 2001, TAX EVASION AND TAX COMPLIANCE

Moh Nasir (2009) etode Penelitian.Jakarta, Ghalia Indonesia

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI. Edisi Empat

Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Narimawati, Umi. 2011. *Penulisan Karya Ilmiah.* Bekasi : Genesis

Osman Fatih SARAÇOGLU, PhD, Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case

Siti Kurnia Rahayu, 2009, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayuu, 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sony Devano, dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan*: *Konsep, Teori, dan Isu, Satu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sugiono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. ALFABETA, Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Yongzhi, Niu. "*Tax Audit Impact on Voluntary Compliance," National Tax Journal.*

www. pajak.com, 25 Mei 2009

www.okezone.com/ Raden Agus Suparman;2011